



**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**Sudah Rp 727 Juta KN Kembali**

**Penyidik Lengkapi BP Korupsi Setwan Seluma**

**BENGKULU** – Berkas perkara (BP) dua tersangka korupsi anggaran BBM dan perawatan kendaraan dinas (randis) Setwan Seluma tahun 2017, sudah pernah dilimpahkan penyidik Subdit Tipidkor Polda ke Kejati Bengkulu. Namun BP dinyatakan belum lengkap, sehingga dikembalikan (P19) oleh jaksa disertai beberapa poin petunjuk yang harus dilengkapi penyidik.

Sementara itu dua tersangka dalam kasus ini, FL Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan SA Bendahara Setwan Seluma yang tak ditahan penyidik, secara berangsur melakukan pengembalian kerugian negara (KN). Dari total KN Rp 927 juta sebagaimana hasil audit BPK Perwakilan Bengkulu, telah kembali Rp 727,8 juta lebih. Pengembalian dilakukan dalam dua tahap, pertama Rp 525,400 juta dan kedua Rp 202,400 juta. Sisa Rp 200 juta akan segera menyusul dikembalikan oleh kedua tersangka.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Bengkulu, Kombes Pol. Ahmad Tarmizi melalui Kasubdit Tipidkor AKBK Andi Arisandi

membenarkan pihaknya telah melakukan pelimpahan BP tahap I. Saat ini BP tersebut telah kembali ke penyidik untuk kembali dilengkapi sebelum dilimpahkan kembali ke Kejati Bengkulu.

“Kita tengah memenuhi beberapa petunjuk jaksa penuntut umum guna kesempurnaan berkas perkara dua tersangka korupsi anggaran BBM dan perawatan randis Setwan Seluma. Secepatnya kita lengkapi. Target kita akhir tahun ini berkas perkara telah lengkap, sehingga dapat dilakukan pelimpahan tahap II yakni penyerahan kedua tersangka dan barang bukti ke JPU,” jelas Andi Arisandi kepada **RB**, kemarin (12/11).

Andi menambahkan kedua tersangka tetap tidak ditahan karena cukup kooperatif. Apalagi sudah ada niat baiknya melakukan pengembalian seluruh KN sekali pun secara berangsur. Pengembalian telah mulai sejak awal November. “Pengembalian kerugian negara oleh tersangka ini akan menjadi bahan pertimbangan penyidik dan jaksa untuk menentukan pasal yang akan dikenakan oleh tersangka dalam dakwaan nanti. Bahkan, pengembalian kerugian negara ini akan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam

memberikan putusan di persidangan nantinya,” terangnya.

Terkait penambahan tersangka, menurut Andi cukup memungkinkan. Hanya saja harus ada bukti kuat. Karena itu penyidik masih bekerja ekstra keras melakukan pengembangan penyidikan untuk mendapatkan bukti-bukti akan keterlibatan pihak lain dalam pusaran perkara korupsi di Setwan Seluma itu. “Cukup memungkinkan ada tersangka lainnya karena perkara korupsi tidak berhenti pada tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tapi itu tergantung pada alat bukti yang didapati. Baik itu keterangan saksi dan dan fakta-fakta yang didapati,” pungkasnya.

Untuk diketahui, selama proses penyidikan perkara ini terdapat sejumlah saksi yang sudah diperiksa. Diantaranya Sekretaris Dewan (Sekwan) Seluma, Kabag Keuangan, unsur pimpinan DPRD Seluma periode 2014-2019, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Seluma periode 2014-2019 serta dua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Total kerugian negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi tersebut Rp 927 juta dari anggaran Rp 436 juta untuk suku cadang randis dan belanja BBM sebesar Rp 1,2 miliar.

Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan dari semasa penyelidikan hingga kasus tersebut naik ke penyidikan. Seperti diketahui, kasus mulai diselidiki bermula saat BPKRI menemukan laporan belanja BBM di Sekretariat DPRD Seluma tahun 2017 yang tanpa bukti pertanggungjawabannya. Dari nilai belanja sebesar Rp 1,1 miliar diketahui Rp 927 juta tanpa bukti struk belanja BBM maupun biaya perawatan randis unsur pimpinan dewan.

Artinya hanya penggunaan anggaran Rp 172 juta yang dapat dipertanggungjawabkan atau ada SPj-nya. Anggaran biaya perbaikan suku cadang Rp 436 juta dan belanja BBM sebesar Rp 1,2 miliar untuk 12 unit mobil dinas lingkungan sekretariat DPRD Seluma tahun 2017. Ada dugaan fiktif dalam penggunaan anggaran tersebut. Mark Up belanja BBM pimpinan dan anggota DPRD Seluma dan Alat Perlengkapan DPRD Seluma, saat dilakukan pemeriksaan audit BPK tidak ada kerugian negara.

Hanya saja masih ada kekurangan administrasi jenis struk pembelian BBM, kemudian administrasi dilengkapi oleh sekretariat dewan. Namun diduga terjadi penyimpangan sehingga dilakukan penyidikan oleh Polda Bengkulu. (cup)